

## DAFTAR RUJUKAN

- A. Djazuli. 2004. *Fiqh Siyash ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah*. Jakarta: Kencana
- Agung, Andi Anisa. 2014. "Analisis Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintahan". Skripsi, Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar
- Arifin, Zainal. 2011. *Penelitian Pendidikan Metode Paradigma Baru, Cet. I*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Astomo, Putra. 2014. *Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.64 Th.XVI
- Departemen Agama RI. 2000. *Al- Qur'an dan Terjemah*. Semarang: CV.Asy-Syifa
- Falah, Muhammad Nailul. 2017. "Pengisian kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Periode 2013-2018 (Tinjauan Yuridis Atas Pasal 89 UU No.23 Tahun 2014)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Hasil wawancara dengan Bapak Suprat selaku Kepala Desa Pendowokumpul, pada tanggal 13 Januari 2020
- Hasil wawancara dengan Bapak Suliadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Pendowokumpul, pada tanggal 13 Januari 2020
- Hasil wawancara dengan Bapak Jari selaku Kaur Umum Desa Pendowokumpul, pada tanggal 14 Januari 2020
- Hasil wawancara dengan Bapak Sampur selaku Tokoh Masyarakat Desa Pendowokumpul, pada tanggal 15 Januari 2020
- Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Rianto selaku Tokoh Agama Desa Pendowokumpul, pada tanggal 17 Januari 2020
- Hasil wawancara dengan Bapak Surat selaku Tokoh Agama Desa Pendowokumpul, pada tanggal 16 Januari 2020
- HR. Ridwan. 2007. *Fiqh politik gagasan, harapan dan kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press

- [http://kedesa.id/id\\_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-peraturan-desa/perangkat-desa/](http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-peraturan-desa/perangkat-desa/), diakses 1 April 2019
- <https://www.apaarti.com/kekosongan.html>, diakses 1 April 2019
- <https://www.kompasiana.com/mb4juri/551b84b88133116e319de1b9/haram-tanpa-khilafah-lebih-dari-tiga-hari?page=all>, diakses 12 Februari 2020
- Iqbal, muhamammd. 2007. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratamai
- \_\_\_\_\_. 2014. *Fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*. Jakarta: Prenemedia Group
- \_\_\_\_\_. 2014. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenamedia
- Jindan, Khalid Ibrahim. 2007. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013. Medan: Bitra Indonesia
- KBBI, <https://kbbi.web.id/kosong>, diakses 5 Juli 2019
- Manab, Abdul. 2005. *Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta :Kalimedia
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Munir, Subarman. 2012. *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, ( Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, Cetakan Pertama
- Muslim, Nur'aini dan Nasution, Irwan. 2014. *Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA
- Nasution. 2008. *Metode research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Neta, Yulia. 2010. "Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah (Suatu Perbandingan antara Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah) " *Jurnal Fiat Justisia*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No.3
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Nurhadiantomo. 2016. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Surakarta: UMS Sekolah Pascasarjana
- Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 49 ayat 2 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 53 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 67 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 66 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Poerwarsunata, W.J.S, 2003. Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka

Pulungan, J Suyuthi. 2014. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group

Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers

Soehinio. 2000. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: liberty

Solehan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Pers

Subagyo, Joko. 2004. *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta

Sugiyono. 20015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka

- Syafie, Inu Kencana. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Reflika Aditama
- Syarif, Mujar Ibnu dan Zada, Khamami. 2008. *Fiqh Siayah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. PT. Gelora Aksara Pratama
- Syarifudin, Pipin dan subaedah, Dedah. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Triwahyuni, Dewi dan Fuqoha. 2015. *Efektivitas jabatan pejabat pelaksana tugas (PLT.) dalam penyelenggaraan pemerintahan*, jurnal administrasi negara volume 3 nomor 2.
- Undang-undang tentang desa kelurahan dan kecamatan*, 2014. Bandung: Faokus Media
- Undang-undang Peraturan Daerah, Dilengkapi Dengan Peraturan Pemerintah*, 2017. Tanggrang, Transmart: Cetakan Pertama
- Usman, Hasan Dan Akbar, Purnomo Setia. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo